

TATA BAHASA SEBAGAI CERMINAN NILAI IDEOLOGIS WACANA POLITIK PEREMPUAN DALAM “*KOLOM PEREMPUAN*”: KAJIAN ANALISIS WACANA KRITIS ATAS TEKS DI HARIAN *SUARA MERDEKA*

Muhamad Muhajir
muhajirmuhamad15@gmail.com

Abstrak

Analisis Wacana Kritis (AWK) merupakan salah satu kajian bahasa untuk mengungkap ideologi tertentu khususnya ideologi gender. Penelitian ini bertujuan mengetahui pilihan bahasa dalam tata bahasa berdasarkan makna pengalaman serta mengetahui nilai ideologis yang terkandung di dalam teks wacana. Data dalam penelitian ini berupa 23 klausa yang mengandung kata “perempuan”. Data tersebut dianalisis menggunakan ancangan Analisis Wacana Kritis (deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi) dan Sistemik Fungsional Linguistik (SFL). Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan simak bebas libat cakap dan catat. Sementara itu, analisis data menggunakan metode analisis konten/ *content analysis* dengan teknik *abduktif inferensial*. Hasil analisis menunjukkan bahwa ideologi yang tercermin berdasarkan kosakata terdiri atas pola klasifikasi (gambaran realitas), kata-kata ideologis yang diperjuangkan (problem politik perempuan), *rewording* (menunjukkan kesetaraan), relasi makna (posisi inferior), dan metafora (menggambarkan realitas dengan simbolis). Sementara itu, berdasarkan tata baha terdiri atas transitivitas, yaitu proses material (penonjolan agen tanpa *goal* dan sasaran dari tindakan dan kebijakan), proses mental (pengendalian afeksi *goal* dalam menggambarkan realitas), proses eksistensial (terikat paham patriarki), proses relasional (memberikan identitas dan identifikasi), nominalisasi dan pemasifan (penyembunyian agen untuk melindungi pelaku), dan kalimat negasi (pembelaan kepada nasib perempuan). Selanjutnya, struktur teks terdiri atas tesis, argumen, elaborasi, dan reiterasi.

Kata Kunci :Makna pengalaman, AWK, SFL, dan Ideologi

Abstract

Critical Discourse Analysis is one of the language studies to uncover certain ideology particularly gender ideology. This research aimed to find out the language choice from the text writer both lexically and grammatically based on the experiential meaning. In addition, it aims to figure out the ideological value contained in discourse text. The data used in this research are 23 clauses in which there are woman words. The data were analyzed by using Critical Discourse Analysis (description, interpretation, and explanation) and Systemic Functional Linguistics approach. The data collection method was used documentation method with non-participatory observation and note-taking techniques. The data were analyzed by using content analysis method with abductive inferential technique. The result of this research shows that the reflected ideology based on lexical is revealed through the classification pattern (reality depiction), struggled for-ideology words, rewording (showing equality), meaning relation, and metaphor (picturing reality using symbol). In addition, the reflected ideology based on the grammatical is indicated by transitivity namely material process (projecting agent without goal, and target of action and policies), existential process (patriarchy bound), nominalization and passivation (hiding agent to cover actors), and negative sentence (defense on woman nature and condition). Then The structure text is analytical exposition consisting of thesis, argumentation, elaboration, and reiteration.

Key words: experiential meaning, SFL, CDA, ideology

PENDAHULUAN

Wacana politik perempuan merupakan bagian dari kajian Analisis Wacana Kritis (AWK). Keberadaan AWK digunakan untuk mengungkap ideologi salah satunya adalah ideologi gender yang digambarkan melalui teks. Kemunculan wacana menjadi representasi dan menggambarkan ide serta pengalaman manusia terkait konteks tertentu. Selain itu, wacana juga mengandung nilai ideologis melalui pilihan kosakata, tata bahasa, dan struktur teks. Kajian terhadap wacana politik perempuan secara linguistik sudah banyak dilakukan sebelumnya oleh para peneliti. Hal ini menunjukkan bahwa objek kajian tersebut penting karena digunakan untuk mengetahui representasi perempuan dalam menggambarkan realitas sosial dan muatan ideologis yang ingin diungkapkan penulis teks melalui teks. Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, penelitian dengan pendekatan AWK melalui pisau SFL sudah ada yang melakukan, tetapi penelitian yang mengkaji makna pengalaman dengan menggunakan analisis Sistemik Fungsional Linguistik belum banyak dilakukan.

Oleh sebab itu, fokus dari penelitian ini adalah mengkaji pilihan bahasa yang direpresentasikan dalam pilihan tata bahasa berdasarkan makna pengalaman (*experiential meaning*) dan mengetahui nilai ideologis pada pilihan bahasa. Analisis digunakan terhadap wacana tersebut menggunakan perangkat Sistemik Fungsional Linguistik (SFL) melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) yang terdiri dari tiga tahapan, yakni deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pilihan bahasa penulis teks dalam menggambarkan realitas melalui tata bahasa dan mengetahui muatan ideologis yang terkandung dalam teks. Fitur tata bahasa terdiri dari: transitivitas, nominalisasi, pemasifan, dan penegasian.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai tambahan perbendaharaan literasi kajian Analisis Wacana Kritis (AWK) bagi peminat kajian wacana politik perempuan berbasis gender dengan metafungsi bahasa, khususnya makna pengalaman (*experiential meaning*). Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peminat AWK dalam memahami nilai ideologis berdasarkan pilihan bahasa, baik kosakata maupun tata bahasa.

LANDASAN TEORI

Critical Discourse Analysis dan Systemic Functional Linguistic

Menurut Fairclough dan Wodak dalam Eriyanto (2001:7) keberadaan wacana (tuturan dan tulisan) tidak hanya dipandang sebagai studi bahasa, tetapi wacana dipahami sebagai praktik sosial. Kehadiran wacana dipengaruhi oleh situasi, institusi, dan struktur sosial yang membentuknya. Selain itu, wacana juga mencerminkan ideologi-ideologi kekuasaan tertentu.

Dalam kajian CDA, teks tidak dapat netral atau tidak memiliki maksud melainkan membuat bias/ ketidakseimbangan fakta (Rankema, 2004:283). Wodak dan Meyer (2001) juga menjelaskan makna kritis, ideologi, dan kuasa. Kritis dipahami sebagai adanya perbedaan antara kenyataan yang ada dengan apa yang disampaikan oleh para penguasa (Wodak, 2001:9). Ideologi dipandang sebagai aspek penting dalam mengungkapkan adanya ketidakadilan dalam pembagian kekuasaan (Wodak, 2001:10). Selanjutnya, kuasa mengindikasikan bahwa bahasa dapat memiliki kekuasaan apabila disampaikan oleh pihak yang memiliki kuasa dalam suatu struktur sosial sehingga dapat dikatakan bahwa bahasa berkaitan erat dengan struktur sosial (Wodak, 2001:10).

Analisis Wacana Kritis/*Critical Discourse Analysis* (CDA) merupakan pengembangan dari kajian analisis wacana. Dalam analisis wacana, teks merupakan

unsur yang diteliti karena keberadaan “teks” digunakan dalam ilmu linguistik untuk setiap bahasa tulis maupun lisan (Halliday,1984:2). Teks dapat berupa prosa atau syair, monolog atau dialog. Teks bukanlah satuan gramatikal seperti klausa atau kalimat dan tidak ditentukan oleh ukuran panjang atau pendek. Tetapi, teks merupakan satuan gramatikal yang berkaitan dengan kalimat, di mana kalimat juga berkaitan dengan klausa, klausa berkaitan dengan kelompok kata, dan seterusnya.

Menurut Darma (2009:58) keberadaan CDA digunakan untuk menyoroti bagaimana konvensi serta praktik berbahasa dalam hubungan sosial dan proses ideologis yang sering tidak disadari oleh masyarakat. Bukan hanya itu, CDA juga digunakan sebagai proses (penguraian) untuk memberi penjelasan dari sebuah teks (realitas sosial) yang mau atau sedang dikaji seseorang atau kelompok dengan tujuan tertentu (Darma, 2009:49). Darma juga berpendapat bahwa CDA juga digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu, menerjemahkan, menganalisis, dan mengkritik kehidupan yang tercermin dalam teks maupun ucapan.

Salah satu cara dalam mengkaji CDA adalah *Systemic Functional Linguistic* (SFL) gagasan dari Halliday. SFL merupakan salah satu aliran kajian bahasa fungsional yang mengkaji makna suatu teks untuk mengetahui bagaimana bahasa digunakan dalam kehidupan sosial. Selain itu, juga memandang bahwa bahasa sebagai fenomena sosial. Dasar dari teori ini bersifat fungsional karena dalam memahami makna, teks tidak dipandang sebagai bagian-bagian yang terpisah tetapi dipandang keseluruhan secara bersama dengan beberapa sudut pandang yang berbeda (Halliday dan Hasan, 1994: 32).

Dalam pendekatan ini, unit terkecil dalam analisis bahasa adalah klausa dikarenakan setiap pemikiran seseorang diwujudkan di dalamnya. Ketika ide-ide yang disampaikan seseorang itu kompleks, maka akan dihasilkan klausa kompleks. Teori yang dipelopori oleh M.A.K Halliday ini, memandang bahasa sebagai suatu pilihan makna yang meliputi metafungsi ideasional, interpersonal, dan tekstual, yang masing-masing diungkapkan melalui transitivitas, modus, dan struktur tema-remata dalam sebuah klausa (Tomasowa, 1994: 35).

CDA dan SFL digunakan untuk melihat bahasa sebagai sebuah aktifitas sosial sehingga bahasa dipelajari dalam konteks sosial tertentu. Dalam menghubungkan antara CDA dengan SFL bukanlah menggabungkan kedua jenis penelitian ini, namun lebih kepada hubungan kerjasama di antara keduanya (Young dan Horison, 2004:2). SFL digunakan sebagai pisau analisis, kemudian temuan-temuan dari SFL tersebut diinterpretasikan sehingga menjadi analisis kritis.

Tahapan Analisis Wacana Kritis Menurut Fairclough

Dalam memahami bahasa sebagai wacana dan praktek sosial, maka perlu dianalisis mengenai hubungan antar teks, proses, dan kondisi sosial teks. (Fairclough,1989:26). Menurut Fairclough ada tiga tahapan untuk menganalisis bahasa sebagai praktek sosial, yakni tahapan deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi.

Tahap Deskripsi

Dalam tahap ini, fitur-fitur yang berkaitan dengan makna pengalaman dijelaskan tanpa dikaitkan dengan aspek lain. Makna pengalaman merupakan makna yang berkaitan dengan siapa, apa, kapan, dimana, kenapa, dan bagaimana yang lebih dikenal dalam teori SFL dengan partisipan, proses, dan sirkumstansi. Menurut (Fairclough,1989:110-112) fitur-fitur linguistik pada tahap deskripsi adalah kosakata, tatabahasa, dan struktur teks. Kosakata meliputi pola klasifikasi, kata-kata ideologis, *rewording*, relasi makna (sinonim

dan antonim), dan metafora. Tatabahasa meliputi transitivitas, nominalisasi, pemasifan, dan penegasian. Sedangkan struktur teks digunakan untuk mencari tahu konvensi interaksi apa yang digunakan seseorang, seperti *turn taking* dan mencari struktur yang lebih besar.

1. Fitur-fitur tata bahasa dalam makna pengalaman

Fitur-fitur makna pengalaman dalam tatabahasa terdiri: (a) transitivitas, (b) nominalisasi, (c) pemasifan, (d) penegasian, dan (e) metafora (Fairclough, 1989:110-111)

Transitivitas

Istilah transitivitas merupakan konsep semantik karena berupaya menjelaskan atau memaparkan makna pengalaman (*ideational meaning*). Transitivitas berkaitan erat dengan dimensi medan teks, yang berpusat pada unsur proses sehingga proses merupakan bagian utama dalam transitivitas. Dalam kajian SFL, Halliday (1994:107) mengemukakan bahwa satu unit pengalaman yang sempurna direalisasikan dalam klausa yang terdiri atas (1) proses, (2) partisipan, dan (3) sirkumstan.

Proses dikatakan sebagai aktivitas yang terjadi dalam klausa atau disebut verba. Partisipan adalah orang atau benda yang terlibat dalam proses tersebut. Sirkumstan merupakan lingkungan tempat proses yang melibatkan partisipan terjadi. Karena inti pengalaman adalah proses, maka dalam tataran klausa, proses menentukan jumlah dan kategori partisipan dan sirkumstan.

Menurut Halliday (200, 56), ada tiga pengertian subyek yang bisa dikenali : ‘subyek psikologis’, ‘subyek gramatikal’, dan ‘subyek logis’. Subyek psikologis berarti ‘subyek yang merupakan pokok dari pesan’ (Tema). Subyek gramatikal berarti ‘subyek yang hal ihwalnya dipredikasi’ (Subjek). Selanjutnya, subyek logis berarti ‘pelaku tindakan’(Aktor).

Tabel proses dan partisipan

No	Proses (Pr)	Partisipan (Pt)
1	Material	Pelaku (<i>actor</i>), tujuan (<i>goal</i>), lingkup (<i>range</i>), penerima (<i>recipient</i>)
2	Mental	Pencerap (<i>Senser</i>), fenomena (<i>phenomenon</i>), <i>receiver</i>
3	Verbal	Pembicara, pendengar, isi pembicaraan (<i>verbiage</i>)
4	Eksistensi	wujud (<i>existent</i>)
5	Relasional	Pembawa/ <i>atribut</i> (<i>Carrier/attribute</i>), <i>Token-Nilai</i> (<i>Value</i>)
6	Perilaku	Pemerilaku, perilaku (<i>Behaver, behavior</i>)

a. Proses Material

Eggins (2004: 215) menyatakan bahwa proses ‘melakukan’ disebut sebagai proses material. Pada dasarnya proses material adalah wujud dari melakukan sesuatu. Jadi, proses material adalah proses melakukan atau proses tindakan.

Contoh: Roy menulis surat, Roy dimarahi Budi

Pt:aktor Pr:material Pt:goal Pt:recipien Pr:material Pt:aktor

b. Proses Mental

Halliday (dalam Eggins, 2004: 225) menyatakan bahwa proses yang menandakan makna berpikir atau merasakan disebut proses mental. Halliday membagi proses mental menjadi tiga kategori, yaitu kognisi yang berkaitan dengan berpikir, mengetahui, dan memahami; afeksi yang berkaitan dengan perasaan seperti kegembiraan, ketakutan; dan persepsi yang berkaitan dengan proses melihat dan mendengar.

Contoh: Roy memikirkan ujian nasional

Pt:senser Pr:mental Pt:phenomenon

c. Proses Relasional

Proses relasional merupakan proses yang menggeneralisasikan atau menghubungkan pengalaman ke hal lain (Halliday dalam Eggins, 2004: 233). Proses relasional mencakup mengklasifikasi, mengidentifikasi, dan kepemilikan. Keadaan ini dapat dikelompokkan berdasarkan apakah keadaannya digunakan untuk memberikan kualitas pada sesuatu (*attributive*) atau menentukan/memberikan identitas sesuatu (*identifying*). Dalam proses atributif (*attributive*), peran partisipan adalah pembawa (*carrier*) dan atribut (*attribute*). Klausa yang memiliki proses atributif tidak dapat dipasifkan. Hal tersebut berarti bahwa subjek gramatikal itu selalu adalah *carrier*. Sementara itu, dalam proses identifikasi (*identifying*), peran partisipan adalah token dan value. Klausa dalam proses identifikasi/pengenalan dapat dipasifkan (Halliday, 2004: 256-259)

Contoh: Perempuan bisa hebat
 Pt:Carrier Pr:Relasional Pt:Atributif
 Wanita merupakan pendidik pertama bagi anaknya
 Pt:Token Pr:relasional Pt:value

d. Proses Wujud (Eksistensial)

Proses eksistensial mewakili pengalaman dengan keberadaan sesuatu (Eggins, 2004: 239). Partisipan wajib dalam proses ini adalah eksistensial.

Contoh: Di sekolah terdapat siswa yang rajin dan malas.
 Sirk:tempat Pr:eksistensial Pt:eksistensial

e. Sirkumstan

Istilah sirkumstan mencakup semua pertanyaan ‘kapan’, ‘di mana’, ‘mengapa’, ‘bagaimana’, ‘berapa banyak’, dan ‘apa’. Sirkumstan dalam klausa dijelaskan dengan kata keterangan atau frasa preposisi (Eggins, 2004:222). Terdapat tujuh macam sirkumstan yang akan dijelaskan berikut ini:

Tabel sirkumstan

No	Sirkumstan	Sub kategori	Identifikasi	Contoh
1	Rentang	Waktu dan tempat	Berapa lamanya? Berapa jauhnya?	Dia berjalan dua jam Mereka berjalan 5 kilometer.
2	Lokasi	Waktu dan tempat	Kapan? Di mana?	Pameran buku diselenggarakan di Gramedia. Temanku dilahirkan di Jepara.
3	Cara	Alat Kualitas Perbandingan	Dengan apa? Seperti apa? Bagaimana?	Rudi tiba di Kendal dengan mobil Rudi belajarlah dengan tekun. Bu guru menyayangi siswanya seperti menyayangi anaknya.
4	Sebab	Alasan Tujuan Peruntukan	Mengapa? Untuk apa? Untuk siapa?	Sekolah diliburkan sementara akibat banjir. Rika rajin belajar agar lolos ujian Ibu membelikan baju untuk anaknya
5	Penyerta	-	Dengan siapa?	Roy datang dengan adiknya.
6	Peran	-	Sebagai apa?	Saya bicara sebagai sahabat.
7	Masalah	-	Tentang apa?	Dia bicara mengenai linguistik.

Nominalisasi

Nominalisasi merupakan pengubahan kata kerja (verba) menjadi kata benda (nomina) dengan penghilangan pelaku sehingga yang ditekankan bukan lagi tindakan, tetapi peristiwa (Fairclough, 1989:125). Menurut Schleppegrell dalam (Fill, 2001:226) nominalisasi merupakan cara yang digunakan dalam merubah kata kerja menjadi kata benda tanpa melibatkan pelaku. Penghilangan pelaku tersebut dimaksudkan untuk

menyamarkan (abstrak) dari tanggungjawab yang dilakukan oleh agen. Misalnya, menembak menjadi penembakan dan memukul menjadi pemukulan.

Pemasifan

Proses pasifasi merupakan cara yang dilakukan dalam pembuatan kalimat tanpa menghadirkan pelaku. Penghilangan pelaku bertujuan untuk menyembunyikan atau melindungi agen. Selain itu, penghilangan tersebut dimaksudkan menghindari *pleonasm* (pemborosan kata) karena informasi yang disampaikan sudah jelas. (Fairclough, 1989:125). Menurut Kahn dalam (Fill, 2001: 243) penggunaan kalimat pasif digunakan untuk penyembunyian agen dengan maksud eufimisme (menyembunyikan kebenaran dan menghindari pemikiran kritis). Misalnya, Rika membaca buku menjadi buku dibaca.

Penegasian

Penggunaan kalimat negasi dimaksudkan untuk menyangkal atau mengingkari pernyataan lawan bicara atau pembicara yang dianggap keliru oleh pembicara itu sendiri. Bentuk negasi berfungsi mengubah pernyataan positif menjadi pernyataan negatif (*realis assertion* menjadi *irrealis assertion*). Dalam penggunaan pernyataan negatif, penulis teks mempunyai ideologi yang ingin disampaikan kepada pembaca. (Eriyanto, 2001:251). Misalnya, Risa memang pandai, tetapi pelit.

Tahap Interpretasi

Tahap ini merupakan cara menafsirkan produksi teks dengan konteks sosial yang terjadi pada saat itu. Dalam melakukan interpretasi, terdapat dua hal yang harus dilakukan oleh interpreter. Pertama, interpretasi teks. Kedua, interpretasi konteks. Interpretasi teks mencakup fonologi, tata bahasa, dan kosakata sebagai pengetahuan dasar bahasa, semantik dan pragmatik untuk mengetahui makna tuturan, kohesi untuk mengetahui koherensi lokal, sedangkan skemata untuk mengetahui untuk mengetahui struktur dan inti teks (Fairclough, 1989:142-144).

Tahap Eksplanasi

Tahap eksplanasi sama dengan dimensi *siocultural practice* yaitu berhubungan dengan konteks di luar teks. Tahap eksplanasi berkaitan dengan hubungan antara konteks interaksi dan sosial, yaitu dengan penentuan proses produksi dan interpretasi serta efek-efek sosialnya. Keberadaan teks yang dihasilkan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya yang melingkupi terciptanya teks yang dapat menunjukkan ideologi dalam masyarakat (Eriyanto, 2001:320). Menurut Fairclough (1989:163) konteks sosial budaya dibagi menjadi tiga level, yakni level sosial, level institusional, dan level situasional. Pada level sosial, teks dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya masyarakat. Pada level institusional, teks merupakan hasil dari pengaruh institusi organisasi dalam praktek produksi wacana. Sementara pada level situasional, kemunculan teks didasarkan pada pertimbangan kondisi yang terjadi oleh penulis teks.

Metafungsi Ideasional

Metafungsi *ideasional meaning* (*experiential meaning*) diwujudkan dalam menggambarkan pengalaman penulis teks yang direalisasikan melalui pola transitivitas dan klausa. Adapun fungsi klausa yang mengungkapkan aspek pengalaman dari makna disebut sebagai sistem transitivitas. (Tomasowa, 1994: 38).

Komponen *experiential meaning* memandang klausa sebagai representasi (penggambaran) dari pengalaman yang dimiliki oleh individu dalam kelompok masyarakat. Ada satu sistem utama yang terlibat dalam pemaknaan ini yaitu sistem transitivitas. Analisis transitivitas sebuah klausa berkaitan dengan tiga aspek, yaitu proses, partisipan, dan *circumstance*. Proses direalisasikan dalam kelompok verbal dari klausa,

partisipan direalisasikan dalam kelompok nominal, dan *circumstance* diekspresikan melalui kelompok adverbial (kata keterangan) atau frasa preposisi. Sistem transitivitas ini dibedakan atas enam tipe proses yaitu proses material, mental, verbal, behavioural, eksistensial dan relasional (Eggins, 2004: 213-214).

AWK dan Ideologi Gender

AWK mempelajari tentang dominasi suatu ideologi serta ketidakadilan yang dijalankan dan dioperasikan melalui wacana. Selain itu, ideologi juga menjadi konsep sentral AWK dalam melihat praktik sosial yang terjadi di masyarakat. Keberadaan ideologi ini dikonstruksikan oleh kelompok yang dominan dengan tujuan untuk mereproduksi dan melegitimasi dominasi mereka. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membuat kesadaran khalayak, bahwa dominasi tersebut diterima secara *taken for granted* (alamiah) (Darma, 2009:56-57).

Ideologi menurut Wooffitt (2005:140) adalah kepercayaan yang memobilisasi praktik dan sudut pandang yang mempertahankan ketidaksetaraan di masyarakat. Selanjutnya, Fairclough (1992:87) menyatakan bahwa ideologi memiliki peranan yang penting dalam mengkonstruksi realitas (realitas fisik, hubungan sosial, maupun identitas masyarakat) yang memberi dasar bagi banyak dimensi, yaitu dasar dari bentuk dan makna wacana, kontribusi proses, proses reproduksi dan transformasi dominasi wacana.

Dalam mengkaji AWK berupa wacana gender tidak lepas dari empat ideologi gender, yakni ideologi patriarki, ideologi familialisme, ideologi, ibuisme, dan ideologi umum. Ideologi patriarki memandang bahwa ayah mempunyai hak mutlak atas anggota keluarga. Ideologi familialisme mengkonstruksikan perempuan untuk berperan dalam urusan domestik. Ideologi ibuisme melegalkan tindakan apapun yang diambil oleh perempuan demi keluarga, kelompok, kelas sosial, dan negara tanpa mengharapkan kekuasaan atau prestise sebagai imbalan (Darma, 2009:174)

Konsep Gender dan Seks

Gender lebih mengarah pada peran yang dapat dilakukan laki-laki dan perempuan sedangkan seks berkaitan dengan biologis (alat kelamin). Persoalan gender tidak lepas dari teori *nature* dan *nurture*. Teori *nature* beranggapan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan diakibatkan oleh faktor biologis, sedangkan teori *nurture* perbedaan keduanya diakibatkan oleh konstruksi sosial. Konstruksi sosial tersebut berdampak pada perbedaan gender terhadap keduanya sehingga mengakibatkan posisi laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan. Selain itu, juga berdampak pada ketidakadilan berupa *marginalisasi*, *setereotype*, dan *subordinasi* (Murniati, 2004:XVIII-XIX).

Kesalahpahaman memaknai gender dan seks juga menimbulkan anggapan perempuan *inferior*, sedangkan laki-laki *superior*. Akhirnya, berpengaruh terhadap penggunaan bahasa, Wareing (1999:67) dalam Santoso (2009:31) mengatakan bahwa dalam bahasa Inggris terdapat ketidaksimetrisan kata yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan. Kata-kata yang bermakna laki-laki bersifat umum dibandingkan perempuan. Gelar *Mr* hanya bisa melekat bagi laki-laki, gelar *Miss*, *Mrs*, *Ms* dikenakan bagi perempuan. Selain itu, kata pengusaha secara umum melekat pada laki-laki. Kata *pengusaha* jika diperuntukkan bagi wanita, maka menjadi *perempuan pengusaha*.

Gender dan seks adalah sesuatu yang berbeda. Gender merupakan perbedaan perilaku (*behavioral different*) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, bukan kodrat (ketentuan Tuhan), melainkan diciptakan oleh manusia melalui proses sosial kultural yang panjang. Misalnya, perempuan di masyarakat dikenal lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan, sedangkan laki-laki dikenal kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Selanjutnya, seks (jenis kelamin) merupakan pembagian dua jenis kelamin

manusia yang mengacu pada ciri-ciri biologis, yaitu laki-laki memiliki penis, sedangkan perempuan memiliki vagina (Fakih, 1999:7-8).

Wacana Politik Perempuan

Kajian terhadap wacana politik perempuan, tentunya melihat realitas posisi perempuan yang berkecimpung di politik. Dalam kehidupan politik, peran dan posisi perempuan masih dinomorduakan. Hal itu diakibatkan oleh konstruksi sosial. Keterlibatan perempuan dalam politik bertujuan memperoleh kesetaraan peran dan terciptanya keadilan sosial. Melalui politik, perempuan akan memperjuangkan nasib kaumnya karena berbagai bentuk kebijakan dan pengambil keputusan berada di lembaga legislatif dan bisa diraih dengan cara berpolitik (Murniati, 2004:117-119).

Keterlibatan perempuan dalam politik bisa dilakukan dengan cara berpartisipasi di dalamnya. Menurut Huntington dan Nelson (1995:491). Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi dengan maksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi dapat bersifat individual, kolektif, terorganisir, spontan, legal, ilegal, efektif maupun tidak efektif.

Salah satu bentuk partisipasi perempuan berpolitik bisa dilihat Pasca reformasi tahun 1999. Era ini menunjukkan kebangkitan gerakan politik perempuan, terutama untuk melakukan penyadaran perempuan berpartisipasi dalam politik. Salah satu agenda yang diusung adalah kuota 30% bagi perempuan yang termaktub dalam UU Pemilu No. 12 tahun 2003 pasal 65, ayat 1 juga menyatakan adanya alokasi minimum sebesar 30% kepada perempuan untuk duduk di lembaga legislatif. (Sjarifuddin, 2009:34).

Dalam UU RI No. 39 tahun 1999 tentang HAM, pasal 6, juga dinyatakan bahwa sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif harus menjadikan keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Penegasaan hak politik perempuan ini juga dibuktikan dengan diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan (*Convention on the Political Right of Women*) serta penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*convention on the elimination of all form of discrimination againts women*) melalui UU No. 7 tahun 1984 (Sihite, 2007:138).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis kualitatif dengan pendekatan AWK karena dilakukan dengan tiga tahapan, yakni deskripsi, interpretasi dan eksplanasi. Data penelitian ini merupakan data tulis. Data ini diperoleh melalui metode dokumentasi dengan teknik simak bebas libat cakap dan catat (Sudaryanto:1993). Sumber data berasal dari *Kolom Perempuan* pada *Suara Merdeka* tanggal 21 Januari 2014 yang mengandung kata 'perempuan'. Pemilihan data tersebut diambil secara *sampling* dengan teknik *random* (acak) dari 11 populasi yang terdapat di *Kolom Perempuan* di *Suara Merdeka* pada tahun 2014 selama satu tahun (Arikunto, 2006:30). Hal ini dikarenakan 11 populasi memiliki kesamaan terkait ideologi gender. Oleh sebab itu, pengambilan *sampling* menjadi representasi dari populasi data. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis konten/*content analysis* (Krippendorff,2004:36) dengan teknik *abduktif inferensial*. Analisis konten digunakan untuk mengetahui pemarkah-pemarkah makna semantis dari setiap klausa pada wacana *Kolom Perempuan*. Sementara itu, teknik *abduktif inferensial* digunakan untuk mencari muatan ideologi yang terkandung dalam *Kolom Perempuan* berupa 23 klausa yang menggambarkan realitas berdasarkan pengalaman (Fairclough, 1989:113).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian hasil ini, akan disampaikan temuan-temuan terkait fitur-fitur kosakata dan fitur-fitur tata bahasa yang mengandung muatan ideologis sebagai berikut.

Tahap Deskripsi

1. Fitur tata bahasa dalam bahasa perempuan

a. Transitivitas

Data penelitian yang merepresentasikan perempuan terdapat 23 klausa, tetapi proses yang mengisi partisipan perempuan hanya terdiri dari empat, yakni proses material, mental, eksistensial, dan relasional. Berdasarkan kemunculan sistem transitivitas dalam klausa yang menggambarkan kata ‘perempuan’ sebagai partisipan, proses material lebih mendominasi daripada lainnya.

Adapun urutan peringkat kemunculan keempat proses di atas sebagai berikut: ((a) proses material sebanyak 12 (52,17%), (b) proses mental sebanyak 2 (8,70%), (c) proses eksistensial sebanyak 5 (21,73%), dan (d) proses relasional sebanyak 4 (17,40%). Sementara itu, sirkumstan didominasi sirkumstan tempat 11 (55,%), sirkumstan sebab 5 (25%), dan sirkumstan cara 4 (20,%).

a) Partisipan perempuan dalam proses material

Dalam pembahasan ini, sistem transitivitas yang mengisi partisipan ‘perempuan’ hanya terdiri dari tiga partisipan, yakni partisipan pelaku (*actor*), partisipan sasaran (*goal*), dan partisipan penerima (*recipient*). Berdasarkan kemunculan partisipan dalam proses material, partisipan *goal* dan *recipient* lebih mendominasi dibandingkan partisipan *actor*. Hal ini menunjukkan bahwa penulis teks menggambarkan posisi perempuan bersifat pasif dan menjadi sasaran atas tindakan yang dilakukan pelaku.

(1) Perempuan sebagai aktor

Dalam data (31) ini, fitur lingual ‘perempuan’ sebagai partisipan aktor tanpa diikuti partisipan *goal*. Kemunculannya sebagai pelaku hanya diikuti oleh sirkumstan tempat dan cara. Meskipun terdapat proses material, tetapi proses tersebut merupakan kata kerja (*verba*) yang tidak membutuhkan objek (intransitif). Selain itu, posisi *actor* merupakan subjek gramatikal artinya pelaku tersebut hanya berfungsi sebagai perlengkapan gramatikal bukan sebagai pelaku yang melakukan tindakan sebagaimana subjek logis. Fungsi fitur lingual ‘perempuan’ dimunculkan hanya sebagai pelaku tanpa adanya sasaran yang ingin dicapai. Hal menunjukkan bahwa ‘perempuan’ berdasarkan pengalaman penulis melalui produksi teksnya bersifat pasif atau cuma sekedar simbol dalam urusan politik. Sementara itu, pada data (32) fitur lingual ‘perempuan’ berupa subjek logis yang diikuti *verba transitif* sehingga melibatkan partisipan *goal* berupa ‘keberpihakan’ dan *recipient* berupa ‘kesetaraan gender’. Namun, sasaran yang ingin dicapai berupa perihal hal yang abstrak (keberpihakan) bukan berupa sasaran yang konkrit. Keberadaan fungsi partisipan *goal* merepresentasikan posisi perempuan masih mengalami diskriminasi sehingga pembelaan terhadap gender menjadi cita-cita kaum hawa yang harus diperjuangkan oleh partisipan *actor*.

Berdasarkan data (31) dan (32), fitur lingual yang menghadirkan perempuan sebagai partisipan aktor dalam proses material selalu diikuti modalitas intensional ‘akan’ yang memiliki makna keinginan atau harapan. Kehadiran modalitas ‘akan’ pada frase ‘akan bangkit dan berkembang’ dan ‘akan menentukan’ tidak menunjukkan masih dalam keinginan belum dilakukan. Meskipun sebagai proses material yang memiliki makna tindakan (*do something*).

(1) Lebih dari itu *perempuan* akan bangkit dan berkembang

Sirk:Cause Pt:aktor Pr:material
 dalam fitrah dan perannya dalam ranah publik secara alami.
 Pt:range Sirk:location Sirk:cause

- (2) **Peran dan partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif** tentu saja

Pt:aktor
 akan menentukan keberpihakan kepada kesetaraan gender.
 Pr:material Pt:goal Pt:recipien

(2) Perempuan sebagai goal

Dalam data (33), (34), (35), dan (37), fitur lingual ‘perempuan’ berfungsi sebagai subjek psikologi (*goal*) atas tindakan subjek logis (aktor). Sementara itu, data (36), dan (38) fitur lingual ‘perempuan’ berfungsi sebagai subjek psikologi, tetapi tidak menghadirkan aktor. Keempat data di atas, fitur lingual ‘perempuan’ disusun dengan proses material berupa verba aktif dengan menghadirkan pelaku. Selanjutnya, kedua data di atas partisipan *goal* fitur lingual ‘perempuan’ disusun dengan proses material berupa verba pasif (dimulai dan dikontrol).

Kehadiran partisipan *goal* dari fitur lingual ‘perempuan’ diikuti oleh sirkumstan tempat, sebab, dan manner. Hal ini menunjukkan bahwa fitur lingual ‘perempuan’ terikat oleh keadaan tertentu. Jadi, berdasarkan data, penonjolan partisipan *goal* menunjukkan bahwa penulis teks menggambarkan bahwa perempuan bersifat pasif karena posisinya selalu ditempatkan sebagai subjek psikologi yang menerima sasaran dari pelaku, baik pelakunya jelas maupun tidak jelas. Selain itu, penulis teks juga menggambarkan adanya diskriminasi terhadap kaum hawa dalam politik.

- (3) Padahal, konstitusi sudah mengamanatkan **30 persen kuota perempuan**

Pt:Actor Pr:Material Pt:Goal
 pada daftar calon tetap (DCT) pemilu legislatif
 Sirk:Loc

- (4) Faktanya, banyak partai politik yang memasang **DCT perempuan**

Pt:Act Pr:Material Pt:Goal
 hanya sekadar untuk memenuhi syarat kualifikasi saja
 Sirk:Cause

- (5) Kedua, kecenderungan pertama tersebut pada titik tertentu

Pt:aktor
 akan melahirkan **eksploitasi perempuan** dalam ranah politik
 Pr:material Pt:goal Sirk:location

- (6) Namun, kiranya lebih efektif jika **emansipasi politik perempuan**

Konj. Sirk:manner Konj. Pt:goal
 dimulai dari pembangunan kesadaran berpolitik kaum perempuan
 Pr:material Pt:range

- (7) Eksploitasi politik ini, alih-alih mengangkat **emansipasi perempuan**

Pt:aktor Pr:material Pt:goal
 dalam ranah politik, hanya akan menjadikan **perempuan**
 Sirk:location Pr:material Pt:goal
 sebagai komoditas politik.
 Pt:role

- (8) Menurut saya, **pembangunan peran perempuan** pada ranah publik,

Pt:goal Sirk:location
 khususnya politik, tidak harus dikontrol melalui kebijakan dan
 Pr:material Sirk:manner
 peraturan perundang-undangan

(3) Perempuan sebagai penerima atau recipient

Dalam data (39), (40), (41), dan (42), fitur lingual ‘perempuan’ dihadirkan sebagai partisipan *recipient* atau subjek psikologi atas tindakan pelaku. Meskipun pada keempat data di atas, susunan klausanya berupa verba aktif maupun pasif ataupun aktornya disebutkan atau tidak, fitur lingual ‘perempuan’ hanya sebagai sasaran tindakan artinya penulis teks menggambarkan posisi perempuan itu bersifat pasif sebagaimana partisipan *goal*. Meskipun peran pelakunya berupa peristiwa maupun bukan.

- (9) Bagaimana tidak, **perempuan** hanya digunakan untuk perlengkapan administrasi, demi untuk pemenangan kepentingan politik semata
Pt:recipient Pr:material sirk:cause
- (10) Kesetaraan Gender Ketiga, fenomena di atas menunjukkan ketidakefektifan kuota politik **pada kaum perempuan**
Pt:aktor Pr:material
Pt:goal Pt:recipient
- (11) Sejarah telah menorehkan tinta emasnya bagi **perempuan-perempuan** yang berhasil di zaman dan bidangnya
Pt:aktor Pr:material Pt:goal Pt:recipient
Pt:location
- (12) Era kesetaraan gender yang saat ini menguat, sebenarnya memberi kesempatan **pada perempuan** untuk berdiri sendiri setara dengan laki-laki tanpa harus dikontrol melalui kebijakan
Pt:Aktor Pr:material
Pt:goal Pt:recipient Sirk:cause

b) Perempuan dalam proses mental

Dalam proses mental yang mengisi liter lingual ‘perempuan’ ada dua, yakni partisipan yang merasakan (*senser*), dan partisipan yang dirasakan (*phenomenon*). Berdasarkan data, proses ini lebih menonjolkan partisipan *phenomenon* dan penghilangan partisipan *senser*. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang dirasakan atau peristiwa yang dirasa oleh *senser* lebih penting dan tanpa penyebutannya sudah berterima. Ideologi yang terkandung dari proses ini adalah penekanan terhadap persoalan

a) Perempuan sebagai *phenomenon*

Berdasarkan data (43) dan (44) partisipan *phenomenon* dari fitur lingual ‘perempuan’ berperan menjadi peristiwa yang dirasakan dari proses mental *afeksi* (terkesan) dan mental *kognisi* (dipahami) lebih ditonjolkan dan tanpa penyebutan *senser*. Hal ini menunjukkan tanpa penyebutan *senser* sudah berterima karena *senser* sudah tercantum dalam *phenomenon* yaitu fitur lingual ‘perempuan’. Selain itu, adanya penanda modalitas epistemik ‘harus’ pada data (44) bermakna keharusan menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan merupakan langkah untuk meningkatkan pemahaman kaum hawa terhadap politik sehingga dapat memperjuangkan nasib kaumnya.

- (13) sehingga **pencantuman perempuan** dalam DCT terkesan asal cantum dan pasang saja
Konj. Pt:phenomenon Sirk:location Pr:mental
Sirk:manner
- (14) **Kebijakan kuota perempuan** harus dipahami sebagai bagian dari pembangunan sistem kesetaraan gender dalam ranah politik
Pt:phenomenon Pr:mental Pt:role
Sirk:location

c) Perempuan dalam proses eksistensial

Proses eksistensial hanya memiliki satu partisipan yaitu *existen*. Berdasarkan data, terdapat lima klausa yang menggambarkan proses eksistensial. Dari kelima data tersebut didominasi oleh proses eksistensial berupa *numeralia* dengan kategori 'sedikit'. Penulis teks ingin menggambarkan realitas sosial bahwa keberadaan perempuan yang berjuang di politik tidak banyak. Berikut penjelasannya.

(1) Perempuan sebagai *existen*

Fitur lingual 'perempuan' pada data (45), (46), (47), (48), dan (49) sebagai partisipan eksisten berfungsi sebagai keberadaan. Dalam pembahasan ini, terdapat lima partisipan eksisten, yakni '*kaum perempuan*', '*ketimpangan antara idealitas kuota 30 persen caleg perempuan dengan realitas*', '*caleg perempuan yang menindaklanjuti*', '*kaum perempuan yang terjerat kasus korupsi*', dan '*jaminan bahwa perempuan selalu baik dan lembut*'. Data (45) partisipan eksisten 'kaum perempuan' didahului oleh proses eksistensial berupa jumlah. Hal ini menunjukkan bahwa kaum perempuan yang serius di bidang politik jumlahnya sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Sementara itu, dua proses eksistensial yaitu pada data (46) dan (47) menghadirkan partisipan perempuan yang diikuti oleh sirkumstan berupa frase preposisional, yakni sirkumstan tempat. Kedua data di atas menunjukkan adanya pengalaman penulis bahwa partisipan perempuan dalam proses eksistensial berada di konteks tertentu. Selanjutnya, pada data (48) dan (49), partisipan eksisten keberadaannya tidak dipengaruhi oleh peristiwa maupun keadaan tertentu. Posisi perempuan *baik dan lembut* itu tidak bisa diprediksi karena berkaitan dengan sifat manusia.

(15) Jika kita amati secara serius, sangat sedikit

Pr:Eksistensial

kaum perempuan yang serius memperjuangkan pencalegannya

Pt:Eksisten

(16) Sampai di sini, tampaknya ada problem yang cukup krusial, yakni

Sirk:location Pr:eksistensial Pt:Eksisten

adanya ketimpangan antara idealitas kuota 30 persen caleg

Pr:eksistensial Pt:Eksisten

perempuan dengan realitas di lapangan

Sirk:location

(17) Di lapangan, sangat sedikit *caleg perempuan* yang menindaklanjuti

Sirk:location Pr:eksistensial Pt:eksisten

secara serius perjuangan politik

Sirk:manner

(18) Tidak sedikit *kaum perempuan* yang terjerat kasus korupsi, termasuk

Pr:eksistensial Pt:eksisten

bahkan korupsi kelas kakap

(19) Sehingga tidak ada jaminan bahwa *perempuan* selalu baik dan

Konj. Pr:eksistensial Pt:eksisten

Lembut

d) Perempuan dalam proses relasional

Proses relasional dalam hal ini, diisi oleh tiga partisipan *carrier-attribute* dan satu partisipan *token-value*. Berdasarkan data, partisipan *carrier-attribute*, lebih mendominasi dibandingkan partisipan *token-value*. Hal ini menunjukkan bahwa fitur lingual 'perempuan' diposisikan sebagai *atributif* (pelengkap). Selanjutnya, jika *token-*

value, fitur lingual ‘perempuan’ berfungsi sebagai identitas yang membutuhkan penjelasan. Berikut penjelasannya.

(1) Perempuan sebagai *carrier*

Fitur lingual ‘perempuan’ sebagai partisipan *carrier* pada data (50), (51) dan (52) berperan menjadi partisipan yang diberikan atribut. Kata *perempuan* dan *emansipasi perempuan* berperan sebagai pembawa atribut atau penanda, sedangkan kata *hebat*, *mimpi*, dan *formalitas belaka* adalah atributif yang diberikan kepada perempuan.

Dalam partisipan ini, kata ‘hebat’ didahului oleh *modalitas epistemik* yang menunjukkan makna ‘kemungkinan’. Artinya pengalaman penulis teks terkait realitas belum percaya terhadap kemampuan yang dimiliki kaum perempuan. Padahal kompetensi yang dimiliki kaum hawa tidak kalah dengan laki-laki dalam berpolitik. Perempuan memang dikenal sebagai kaum yang lemah dan lembut, tetapi mereka juga mempunyai kemampuan berpikir atau rasionalitas yang tidak kalah dengan laki-laki.

- (20) *Perempuan* bisa hebat melalui potensi diri yang dimilikinya
Pt:carrier Pr:relasional Pt:atribute Sirk:manner
- (21) Jika ini terjadi, maka *emansipasi perempuan* dalam politik, sebagaimana
Sirk:Cause Pt:Carrier Sirk:Loc
yang menjadi cita-cita mulia konstitusi, hanya menjadi mimpi di siang bolong.
Pr:Relasional Pt:Atribute
- (22) Pertama, *kuota politik perempuan* dalam konteks ini hanya bersifat
Pt:token Pr:relasional
formalitas belaka.
Pt:value

(2) Perempuan sebagai *token*

Fitur lingual ‘perempuan’ sebagai partisipan *token* berperan menjadi partisipan yang diberi nilai sedangkan partisipan *value* merupakan nilai itu sendiri. Partisipan *token* pada data (53) berupa grup verbal ‘membangun karakter politisi-termasuk di dalamnya politisi perempuan’ diidentifikasi dengan partisipan *value* berupa grup adverbial ‘salah satu cara bagaimana membangun politik bersih di negeri ini’. Kehadiran partisipan *token* berupa fitur lingual ‘perempuan’ sebagai pemilik identitas yang memiliki dua fungsi, yakni sebagai pelengkap dari partai politik dan harapan adanya politik bersih melalui politisi perempuan.

- (23) Membangun karakter para politisi—*termasuk politisi perempuan*—
Pt:token
secara simultan adalah salah satu cara bagaimana membangun
Pr:relasional Pt:value
politik bersih di negeri ini
Sirk:location

b. Nominalisasi

Muatan ideologis yang hendak disampaikan penulis teks dalam bentuk ini yaitu penyembunyian pelaku, menghindari pleonasme karena pelakunya sudah berterima, dan demi *penghalusan (eufimisme)*. Unsur nominalisasi terdapat pada tujuh klausa yaitu berupa *keberpihakan terhadap kesetaraan gender* (klausa 32), *pembangunan kesadaran berpolitik kaum perempuan* (klausa 36), *pembangunan peran perempuan* (klausa 38), *perlengkapan administrasi dan pemenangan kepentingan politik semata* (klausa 39), *pencantuman* (klausa 43), *pembangunan sistem kesetaraan gender dalam ranah politik* (klausa 44), dan *perjuangan politik* (klausa 47). Dari ketujuh

nominalisasi tersebut yang disusun melalui klausa aktif dan pasif. Adapun verba dari ketujuh nominalisasi di atas berupa *berjuang, melengkapi, membangun, dan memihak*.

Nominalisasi dari klausa pasif terdapat pada data (36), (38), (39), (43), dan (44). Sementara itu, nominalisasi klausa aktif pada data (32) dan (47). Dalam klausa pasif dan aktif, penekanan bukan lagi pada tindakan berupa verba yang dilakukan oleh pelaku, tetapi berupa partisipan *goal* (32), (38), *sirkumstan cause* (47), (39), *sirkumstan manner* (43), dan keterangan dari partisipan (*range, phenomenon*) pada data (36) dan (44).

Proses nominalisasi pada klausa pasif dan aktif cenderung tidak melibatkan sasaran (objek). Namun, pada data (32), nominalisasi menghadirkan unsur sasaran berupa objek 'keberpihakan'. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan nominalisasi bermaksud menyembunyikan pelaku karena posisi pelaku dianggap tidak penting atau bermaksud (*eufimisme*) atas tindakan pelaku agar tidak diketahui, tetapi penonjolan peristiwa yang menjadi penting untuk disampaikan kepada orang lain untuk menghindari *pleonasm* karena informasinya sudah berterima. Selain itu, agen yang terlibat dalam persoalan ketiadaadilan gender sudah diketahui yaitu laki-laki.

c. Pemasifan

Muatan ideologis yang hendak disampaikan penulis teks yaitu penyembunyian pelaku, menghindari *pleonasm* karena pelakunya sudah berterima, dan demi penghalusan (*eufimisme*). Unsur pasifasi terdapat pada klausa yaitu berupa kata *dikontrol* (klausa 38), *digunakan* (klausa 39), *dipahami* (klausa 44), dan *terjerat* (klausa 48). Kehadiran keempat kata tersebut dalam klausa menunjukkan bahwa susunan klausa lebih menonjolkan sasaran (objek) daripada pelakunya (aktor).

Berdasarkan pembahasan ini, data (38), (39), (44), dan (48) yang dilihat dari partisipan perempuan terdapat kata-kata yang mengandung proses pasifasi yaitu *dikontrol, digunakan, dipahami, dan terjerat*. Klausa yang menghadirkan keempat kata tersebut lebih menonjolkan sasaran (objek) daripada pelakunya. Dengan menggunakan proses pasifasi, terdapat muatan ideologis yang hendak disampaikan penulis teks.

Data (38) klausa berupa kata pasif yaitu *dikontrol* menunjukkan adanya penyembunyian pelaku pada susunan klausa tersebut. Penggunaan bentuk pasif dengan penonjolan sasaran berupa *pembangunan peran perempuan* mencerminkan pentingnya objek daripada subjek. Kehadiran pelaku (pemerintah) disamarkan karena yang menjadi topik pembahasan adalah realitas posisi perempuan bukan kebijakan pemerintah terhadap perempuan. Oleh sebab itu, penggunaan kalimat aktif berupa *mengontrol* ditanggalkan dengan maksud menyamarkan pelaku.

Data (39) penggunaan kalimat pasif berupa kata *digunakan* dengan tujuan menghilangkan pelaku dan menonjolkan objek (*goal*). Penonjolan objek merupakan strategi penulis teks ingin menunjukkan posisi perempuan sebagai sasaran. Selain itu, penulis teks juga menganggap penghilangan pelaku dianggap sudah *mafhum* artinya tanpa disebutkan pelakunya, pembaca dapat memahami bahwa pelakunya adalah 'parpol' karena parpol menjadi pintu utama bagi perempuan agar terdaftar dalam DCT terkait lolos atau tidak dalam caleg. Jadi, penulis teks tidak perlu menghadirkan pelaku dengan menggunakan kalimat aktif melalui verba 'menggunakan'.

Data (44) penggunaan kalimat pasif berupa kata *dipahami* bertujuan untuk menyembunyikan agen daripada kata aktif 'memahami'. Dengan penonjolan peristiwa (*phenomenon*) menunjukkan bahwa penulis teks ingin menginformasikan kondisi perempuan yang kena dampak dari kebijakan sehingga merugikan bagi kaumnya.

Misalnya, mengapa kuota hanya berlaku bagi perempuan tidak bagi laki-laki dan kenapa perempuan cuma diberi kuota 30% sedangkan laki-laki 70%. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi laki-laki dalam parpol masih kuat dibandingkan perempuan.

Data (48) penggunaan kalimat pasif berupa kata *terjerat* tanpa melibatkan pelaku bertujuan menyembunyikan pelaku. Klausa tersebut lebih menonjolkan keberadaan (eksistensi) berupa kuantitas jumlah bukan peristiwa sebagaimana data (44). Hal ini menunjukkan bahwa posisi perempuan yang terlibat dalam parpol sedikit.

d. Penegasian

Ideologi yang terkandung dari bentuk ini adalah untuk membedakan apa yang sebenarnya dan tidak sebenarnya. Berdasarkan data, unsur penegasian terdapat pada tiga klausa yang di dalamnya terdapat kata *tidak harus* (klausa 38), *tanpa harus* (klausa 42), dan *tidak sedikit* (klausa 48). Dari ketiga kata negasi tersebut, dua negasi melekat pada modalitas *epistemik* berupa kata 'harus' yang berarti terdapat penilaian penulis teks terkait kemungkinan dan keperluan bahwa sesuatu itu demikian atau tidak demikian. Sementara itu, penegasian yang lain terdapat pada *numeralia* yang menerangkan makna bilangan.

Nilai Ideologi Tata Bahasa dalam Bahasa Perempuan

a. Penonjolan Agen Tanpa Objek

Nilai ideologi ini terdapat pada ketransitifan berupa proses material, di mana partisipan perempuan sebagai aktor. Namun, keberadaan kaum perempuan sebagai pelaku tidak ada *goal*. Hal ini menunjukkan bahwa penulis teks menggambarkan tujuan yang ingin diraih perempuan masih dalam hal kesetaraan peran. Artinya kaum perempuan melakukan tindakan demi kebebasan kaumnya, yaitu kesetaraan gender belum ke arah yang lain. Posisi perempuan dalam data digambarkan sebagai aktor yang bertindak, tetapi masih dalam keinginan atau harapan karena diikuti oleh modalitas intensional "akan".

b. Sasaran dari Tindakan dan Kebijakan

Nilai ideologi ini terdapat pada ketransitifan berupa proses material, di mana partisipan perempuan sebagai goal dan recipien. Partisipan objek berjumlah lima klausa, sedangkan partisipan recipien berjumlah empat klausa. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan perempuan cenderung sebagai sasaran dan korban, baik pelakunya disebutkan maupun tidak disebutkan. Dalam hal ini, peran pelaku bisa berupa kelembagaan, peristiwa, dan permasalahan. Keberadaan perempuan yang diposisikan sebagai goal dan recipien menggambarkan bahwa pengalaman penulis terkait perempuan masih menjadi korban atas berbagai tindakan khususnya di politik.

c. Pengendalian Afeksi dalam Menggambarkan Realitas

Nilai ideologi ini terdapat pada ketransitifan yaitu, proses mental berupa persepsi, *afeksi*, dan *kognisi*. Namun, dalam penelitian ini sesuatu yang dirasakan tersebut berupa *afeksi* 'terkesan', dan *kognisi* 'dipahami'. Klausa yang di dalamnya terdapat kata tersebut menunjukkan adanya pelepasan partisipan senser dan lebih menonjolkan partisipan fenomenon. Meskipun terjadi pelepasan, makna yang hendak disampaikan penulis teks dapat berterima dan secara tersirat partisipan senser terkandung dalam partisipan fenomenon. Penulis teks lebih menekankan pada peristiwa bukan pada perasaannya (senser) karena pembaca sudah *mafhum* atas klausa yang dihasilkan.

Penonjolan partisipan fenomenon menunjukkan bahwa sesuatu yang dirasakan oleh perempuan terkait realitas yang terjadi adalah hal penting. Selain itu, penulis teks juga ingin menyampaikan gagasannya kepada pembaca khususnya perempuan agar

memahami proses berpolitik. Hal itu terdapat pada kata *pencantuman perempuan* (klausa 43) dan *kebijakan kuota perempuan* (klausa 44).

d. Terikat pada Budaya Patriarki

Ideologi ini terdapat pada ketransitifan yaitu, proses eksistensial ‘sangat sedikit’. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan kaum perempuan masih terikat dengan adanya paham patriarki yang menganggap urusan politik hanya bagi laki-laki. Anggapan tersebut berdampak pada sedikitnya partisipasi perempuan dalam berpolitik. Bukan hanya itu, perempuan yang terjun di bidang politik setengah hati dalam berjuang menjadi anggota legislatif. Padahal dengan menjadi anggota dewan, perempuan dapat memperjuangkan dan merubah nasib kaumnya mencapai kesetaraan gender.

e. Memberikan Identitas dan Identifikasi

Ideologi ini terdapat pada ketransitifan yaitu, proses relasional. Ideologi identitas terdapat pada partisipan *carrier-attribute*, sedangkan ideologi identifikasi terdapat pada partisipan *token-value*. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan masih belum yakin atas kemampuan yang dimiliki sehingga tidak lepas dari identitas yang digambarkan penulis teks. Selain itu, ideologi identifikasi menunjukkan bahwa perempuan sebagai individu yang teridentifikasi berdasarkan realitas sosial.

f. Penyembunyian Agen untuk Melindungi Pelaku

Ideologi ini terdapat pada bentuk pasif verba berafiks *di* dan nominalisasi. Berdasarkan pembahasan data, terdapat beberapa klausa yang menggunakan kalimat pasif dan nominalisasi dengan maksud penyembunyian pelaku. Dalam kalimat pasif, partisipan objek lebih ditonjolkan daripada lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa posisi perempuan menjadi sasaran atas tindakan yang parpol maupun kebijakan yang dibuat pemerintah.

Penonjolan sasaran pada bentuk pemasifan dapat diartikan bahwa posisi perempuan seakan pantas menjadi objek daripada pelaku. Penulis teks menggambarkan realitas yang terjadi bahwa kondisi perempuan di masyarakat kerap menjadi sasaran, lebih-lebih penyudutan itu menimpa kaum hawa pada bidang politik. Kata-kata *digunakan*, *dikatrol*, dan *dipahami* merupakan bentuk pasif dari kata *menggunakan*, *mengatrol*, dan *memahami*. Berikut data yang mengandung pemasifan:

Sementara itu, pada data penelitian terdapat tujuh bentuk nominalisasi yaitu (33) *keberpihakan terhadap kesetaraan gender*, (36) *pembangunan kesadaran berpolitik kaum perempuan*, (38) *pembangunan peran perempuan*, (39) *perlengkapan administrasi demi untuk kemenangan kepentingan politik semata*, (43) *pencantuman perempuan*, (44) *pembangunan sistem kesetaraan gender dalam ranah politik*, dan (47) *perjuangan politik*. Dari ketujuh bentuk nominalisasi tersebut, disusun melalui klausa aktif dan pasif. Adapun verba dari ketujuh nominalisasi di atas berasal dari verba *berjuang*, *melengkapi*, *membangun*, dan *memihak*.

g. Pembelaan kepada Nasib Perempuan

Ideologi ini berupa kosakata ‘tidak harus dikontrol’ yaitu pada kalimat negasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan kuota perempuan seharusnya tidak perlu diatur dalam konstitusi karena terkesan adanya peran dan partisipasi perempuan berpolitik itu karena paksaan bukan muncul atas inisiatif kaum hawa. Dengan adanya kuota 30 persen bagi perempuan berarti laki-laki 70%. Artinya kaum perempuan belum setara dengan laki-laki. Oleh sebab itu, kebijakan kuota perlu dipertimbangkan karena masih menimbulkan diskriminasi bagi kaum perempuan. Hal itu dibuktikan dengan klausa *menurut saya, pembangunan peran perempuan pada ranah publik, khususnya politik, tidak harus dikontrol melalui kebijakan dan peraturan perundang-undangan*

SIMPULAN

Penelitian ini memberikan beberapa temuan terkait makna pengalaman (*experiential meaning*) dengan pisau SFL melalui kajian AWK. Temuan berdasarkan makna pengalaman melalui fitur tata bahasa yang meliputi: transitivitas, nominalisasi, pemasifan, dan penegasian. Sementara itu, struktur teks meliputi: tesis, argumentasi, elaborasi, dan reiterasi.

Nilai-nilai ideologis yang tergambar melalui tata bahasa terdiri atas transitivitas, yaitu proses material (penonjolan agen tanpa goal dan sasaran dari tindakan dan kebijakan), proses mental (pengendalian afeksi dalam menggambarkan realitas), proses eksistensial (terikat paham patriarki), proses relasional (memberikan identitas dan identifikasi), nominalisasi dan pemasifan (penyembunyian agen untuk melindungi pelaku), dan kalimat negasi (pembelaan kepada nasib perempuan).

Berdasarkan kajian SFL meliputi: (a) proses material sebanyak 12 (52,17%), (b) proses mental sebanyak 2 (8,70%), (c) proses eksistensial sebanyak 5 (21,73%), dan (d) proses relasional sebanyak 4 (17,40%). Sementara itu, sirkumstan didominasi sirkumstan tempat 11 (55%), sirkumstan sebab 5 (25%), dan sirkumstan cara 4 (20%).

DAFTAR PUSTAKA

- Santoso, Anang. 2012. *Studi Bahasa Kritis*. Malang: Mandar Maju.
- Darma, Yoce Aliah. 2009. *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: CV. Yrama Widya.
- Eggs, Suzane. 2004. *An Introduction to Systemic Function Linguistic*. London: Continuum.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LkiS.
- Fakih, Masour. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fairclough, Norman. 1989. *Language and Power*. New York: Longman Group UK Limited.
- _____. 1995. *Critical Discourse Analysis: the critical study of language*. London: Longman.
- Fill, Alwin, Peter Muhlhauser. 2001. *The Ecolinguistics Reader: Language, Ecology and Environment*. London: Continuum.
- Gerot, Linda dan Wignell, Peter. 1995. *Making Sense of Functional Grammar*. Cammeray: Gerd Stabler.
- Halliday, M. A. K & Ruqaiya Hasan. 1984. *Cohesion in English*. New York: Longman.
- _____. 1994. *An Introduction to Function Grammar* (second edition). London: Edward Arnold.
- _____. 2004. *An Introduction to Function Grammar* (third edition). London: Edward Arnold.
- Huntington, P. Samuel & Joan Nelson. 1994. *Partisipasi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Krippendorff, Klaus. 2004. *Content Analysis an Introduction to its Methodology*. London: Sage.
- Latif, Yudi dan Idi Subandi. 1996. *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orba*. Bandung: Mizan.
- Murniati, Nunuk P. 2004. *Getar Gender: Buku Pertama*. Magelang: Indonesiatara.
- Rankema, Jan. 1993. *Discourse Studies: An Introductory Textbook*. Amsterdam: Jhon Benjamin Publishing Company.

- Sjarifuddin, Nia. 2009. *Peningkatan Keterwakilan Perempuan: Keniscayaan untuk Sebuah Perubahan, dalam Jurnal Perempuan No. 6*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Sihite, Romany. 2007. *Perempuan, Kesetaraan, Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sinar, Tengku Silvana. 2002. *An Introduction to A Systemic-Function Linguistic-Oriented Discourse Analysis*. Singapore: Deezed Consult Singapore.
- Tomasowa, F.H. 1994. "Analisis Klausa Bahasa Indonesia: Pendekatan Sistemik M.A.K. Halliday" dalam PELLBA 7 (Pertemuan Linguistik Lembaga Bahasa Atma Jaya: ketujuh) (Ed. Bambang Kaswanti Purwo). Yogyakarta: Kanisius.
- Ullman, Stephen. 2007. *Pengantar Semantik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Woolfit, Robin. 2005. *Conversation Analysis & Discourse Analysis: A Comparative and Critical Introduction*. London: Sage.
- Wodak, Ruth and Michael Meyer. 2000. *Methods of Critical Discourse Analysis*. London: SAGE Publication
- <https://www.google.co.id/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&ie=UTF-8&rct=j#q=Representasi+sosok+tenaga+kerja+wanita>.